

**POINTERS FORUM PERANGKAT DAERAH
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018 S.D 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Beberapa pointers dalam penyusunan Renstra Perubahan Diskominfo Tahun 2018 s.d 2023 adalah sebagai berikut :

- Tujuan diskominfo adalah: digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah dengan menggunakan indikator indeks SPBE. Dasar hukum menggunakan Perpres 95/2018 sebagai acuan perwujudan SPBE di Jawa Tengah.
- Program prioritas Diskominfo 2018-2023:
 1. smart province & SPBE
 2. Big data & jaringan informasi geospasial daerah
 3. indeks KAMI & TTE
 4. integrasi FO & data center
 5. integrasi kanal aduan masyarakat
 6. peningkatan kapasitas SDM
- Kendala-kendala integrasi kanal aduan masyarakat:
 1. Admin pengelola kanal aduan di kab/kota dan prov belum terintegrasi
 2. komunikasi para admin kanal aduan di kab/kota dan prov perlu ditingkatkan
 3. SOP terkait respon aduan belum terlaksana dengan optimal
- 3 fokus pembangunan TIK:
 1. Integrasi FO
 2. Jaringan FO
 3. Data center
- Target indeks SPBE kab/kota dengan indeks > 2:
 1. 2019 → 5 kab/kota,
 2. 2020 → 10 kab/kota,
 3. 2021 → 15 kab/kota,
 4. 2022 → 20 kab/kota,
 5. 2023 → 25 kab/kota.
- Statistik: untuk data kemiskinan di kab/kota agar segera dipublikasikan hasilnya. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan akurasi data kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
- Pendekatan perencanaan pembangunan prov. Jateng → Tematik, Holistik, Integratif, Spasial.
- Perencanaan pembangunan menerapkan perencanaan terintegrasi (integrated planning) sesuai mandatory → UU 25/2004 – UU 23/2014 – Permendagri 86/2017.

- Isu strategis daerah yang sinkron dengan tupoksi Diskominfo Jateng yaitu isu strategis daerah ke-7 → tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
- IKU daerah yang sinkron dengan tujuan Diskominfo Jateng yaitu pada IKU indeks RB.
- Program unggulan Provinsi Jawa Tengah yang sinkron dengan tupoksi Diskominfo Prov Jateng → Reformasi birokrasi di kab/kota yang dinamis berbasis TI dan sistem layanan terintegrasi.
- Perlunya pemetaan terhadap peran Kominfo pada pembangunan Jawa Tengah. Dengan demikian Kominfo akan memiliki hasil pembangunan yang dapat terukur.
- Kominfo dapat mengatasi isu terhadap keterbatasan SDM dengan memanfaatkan optimalisasi teknologi informasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas.
- Strategi komunikasi yang perlu dilakukan Diskominfo Prov. Jateng yaitu komunikasi kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan dilakukan berulang-ulang. Indikator yang dapat digunakan yaitu masyarakat dapat menjelaskan program pemerintah yang sedang berlangsung.
- Perlunya penunjukan pejabat penerima aduan masyarakat di masing-masing SKPD. Pejabat penerima aduan harus lebih tinggi perannya daripada admin.
- Penerapan intranet dengan memanfaatkan FO yang sedang dibangun oleh Diskominfo Prov Jateng. Dengan demikian keamanan informasi dapat meningkat karena menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) atau intranet.
- Memanfaatkan SDS untuk dijadikan Big Data sehingga Jawa Tengah dapat mengelola google versi Jawa Tengah.
- Screening CSR untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan Kominfo di Jawa Tengah.
- Adanya forum untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus terkait teknologi informasi.
- Tantangan dan Peluang Diskominfo 5 tahun ke Depan :

1. Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Tengah khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;

- f. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Jawa Tengah;
- f. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfo

a. Permasalahan

No	Renstra Perubahan Diskominfo		
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.	1. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem <i>eGovernment</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.
		2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan Pembangunan fiber optic dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 2. Perlu peningkatan layanan kapasitas bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana DRC (Disaster Recovery Center) dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 5. Perlu peningkatan integrasi infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 6. Perlu peningkatan integrasi aplikasi layanan publik dalam

Renstra Perubahan Diskominfo

No	Renstra Perubahan Diskominfo		
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</p>
		<p>3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan layanan pengaduan masyarakat yang baik secara elektronik dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 2. Perlu peningkatan kehumasan dan komunikasi publik serta diseminasi informasi dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. 3. Perlu peningkatan pemahaman terkait Daftar Informasi Publik (DIP). 4. Perlu peningkatan kesadaran badan publik terhadap keterbukaan informasi.
	<p>Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.</p>	<p>1. Ketersediaan data sektoral belum optimal.</p>	<p>1. Perlu peningkatan integrasi data dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government menuju Big Data Jawa Tengah.</p>
		<p>2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government. 2. Perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open

Renstra Perubahan Diskominfo**No****Masalah Pokok****Masalah****Akar Masalah**

Government.

Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal.

1. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

1. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perlu peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Perlu peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perlu peningkatan sistem komunikasi intra pemerintah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Perubahan Indikator dan Target

IKU PD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Induk		Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Perubahan	
			2022	2023				2022	2023
1. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah	1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Indeks SPBE	3,12	3,24	1. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah	1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Indeks SPBE	3,21	3,33
		1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,18	3,30			2. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,53	3,63
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,71	2,82			2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,83	3,95
	3. Indeks Domain Layanan SPBE	3,46	3,60	3. Indeks Domain Layanan SPBE		4,17	4,3		
	2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	60,72 %	75,90 %		2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	81,76 %	95,65 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Induk		Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Perubahan	
			2022	2023				2022	2023
	3. Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2	3		3. Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	3
2. Meningkatkan Tata kelola Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	72,5 %	81,25 %	2. Meningkatkan Tata kelola Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	72,5 %	81,25 %
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	72	81		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	72,00	81,00